



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2025





DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA BATAM



PERUBAHAN RENJA

2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

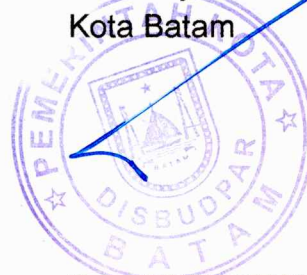
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021-2026

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 3 Juni 2025

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam



Drs. ARDIWINATA
NIP. 196906291989091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 8

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting 15

4.2 Kaidah Pelaksanaan 15

4.3 Rencana Tindak Lanjut 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2025 Kota Batam
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sampai denga triwulan II/Mei tahun 2025.
Tabel 2.3. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan

Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 07/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1097);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025
8. Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor : 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis *Dinas* Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tahun 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

2.1.1.1 Program Pemasaran Pariwisata

- Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

2.1.1.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Tahun 2025 Jumlah Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam Sebesar 1.800.000 Pengunjung, Realisasi Sampai dengan Bulan April 2025 Sebesar 429.886 Pengunjung atau 23.88%.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

2.1.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi dari target yang ditetapkan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dimana pada TW II ini ditetapkan target 50% sedangkan angka realisasinya menunjukkan angka yang sesuai dengan perencanaan yakni 50%.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2025	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				3	4	5	6 = 5/4*100
2	2			URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN			
2	2	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	50%	50%
2	2	0	2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0%	0%
2	2	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	2	0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	50%	50%
2	2	1	2	Perangkat Daerah			
2	2	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100%

2	1	2	0	Tunjangan ASN	Tunjangan ASN			
			0					
			1					
2	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	1	2	0	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN			
			0					
			2					
2	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawalan	Presentase Administrasi Kepegawalan	100 %	50%	50%
2	1	5		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang Terpenuhi			
2	0	2	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	0%	0%
2	1	5	0	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
			0					
			0					
			9					
2	0	2	0	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya penunjang urusan	100 %	50%	50%
2	1	6		Perangkat Daerah	pemerintahan			
2	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	3 Paket	100%
2	1	6	0	Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan			
			0					
			2					
2	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	0 Paket	0%
2	1	6	0	Rumah Tangga	Disediakan			
			0					
			3					
2	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3 Paket	0 Paket	0%
2	1	6	0	Logistik Kantor	Disediakan			

				0				
				4				
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	
	2	1		6	0	Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	100%
				0				
				5				
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	
	2	1		6	0	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan	
				0				
				6				
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	
	2	1		6	0	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
				0				
				9				
2	2	0	2	0	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	
	2	1		7				
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
	2	1		7	0	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				0				
				1				
2	2	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	
	2	1		8		Urusan Pemerintahan Daerah		
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	2	1		8	0	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				0				
				2				

2	2	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	2	1		8	0	0	Pelayanan Umum Kantor	Umum Kantor yang Disediakan			
					0	4					
2	2	0	2	0			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	50%	50%
	2	1		9							
2	2	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	1 Unit	100%
	2	1		9	0	0	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
					1		Kendaraan Dinas Jabatan				
2	2	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	3 Unit	3 Unit	100%
	2	1		9	0	0	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
					2						
2	2	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	5 Unit	100%
	2	1		9	0	0	dan Mesin Lainnya	Dipelhara			
					0	6					
2	2	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
	2	1		9	0	0	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi			
					0	9					
2	2	0					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	10%	50%
	2	2									

2	2	0	2	0		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang diestartikan	20 %	10%	50%
	2	2		1						
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	100%
					1					
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	100%
	2	2		1	0					
					0					
					2					
2	2	0	2	0		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian tradisional yang diestartikan	20 %	10%	50%
	2	2		2						
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	100%
	2	2		2	0					
					0	Tradisional				
					2					
2	2	0	2	0		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Pengannutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	20 %	10%	50%
	2	2		3						
2	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	111 Orang	111 Orang	100%
	2	2		3	0					
					0					
					2					

2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16,66 %	16,66 %	50%
2	2	0	2	0	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di register	16,66 %	16,66%	100%
	2	5		1	Peringkat Kabupaten/Kota				
2	2	0	2	0	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	0 Objek	0%
	2	5		1					
				0					
				2					
2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN	Tingkatan tipe Museum	B Tipe	B Tipe	100%
	2	6			PERMUSEUMAN				
2	2	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Museum	Jumlah pengunjung museum	5000 Peng unjung	5269 Pengunjung	50%
	2	6		1	Kabupaten/Kota				
2	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pembinaan dan	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman	500 Orang	0 Orang	50%
	2	6		1	Peningkatan Mutu dan Kapasitas	yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya			
				0	Sumber Daya Manusia Permuseuman				
				2					
2	2	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang	1 Unit	1 Unit	100%
	2	6		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Tersedia dan Terpelihara			
				0	Museum				
				4					
2	2	0	2	0	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang	2 Unit	2 Unit	100%
	2	6		1	Prasarana Museum	Direvitalisasi			
				0					
				5					

3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1.800.000 Kunjungan	429.886 Kunjungan	23.88%
3	2	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	20 %	10%	50%
3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
3	2	0	2	0	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	1 Usaha	100%
3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah	3 Objek	3 Objek	100%
3	2	0	2	0	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	3 objek	3 Objek	100%
3	2	0	2	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neger	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

					0	Luar Negeri				
					4					
3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	6	3		1	0	Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan	Dalam dan Luar Negeri			
					0	Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				
					6					
3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penguatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi	1 Promosi	1 Promosi	100%
	6	3		1	0	Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media			
					0	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger			
					7	Negeri				
3	2	0				PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	155 Orang	155 Orang	100%
	6	5				SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang	2 Sub Sektor	2 Sub Sektor	
						EKONOMI KREATIF	dibina			
3	2	0	2	0		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang	20 %	10%	50%
	6	5		1		Kapasitas Sumber Daya Manusia	dikembangkan kapasitasnya			
						Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
						Tingkat Dasar				
3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi,	1 Laporan	1 Laporan	100%
	6	5		1	0	Produksi, Distribusi Konsumsi dan	Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi			
					0	Konservasi Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif			
					5					
3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti	80 Orang	80 Orang	100%
	6	5		1	0	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber			
					0	Ekonomi Kreatif	Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
					6					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.800.000	Orang	429.886	Data dari BPS Kota Batam per April 2025
	Lama kunjungan (Length of Stay)	Hari	2,09	Hari	1,92	Data dari BPS Kota Batam per April 2025
	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n – jumlah pelaku EK thn n – 1)/jumlah pelaku EK thn -1	Lokasi	4	Lokasi	2	
	Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK)	Persen	3%	Persen	0.82%	
	Jumlah Pegawai yang ada di Dinas	Orang	45	Orang	58	Ada penambahan 11 PPPK dan 2 PNS
	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100%	Persen	25%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

1. Isu-isu penting terkait Urusan Permuseuman

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan.
- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah
- c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya penyelamatan benda-benda bersejarah
- d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran ke instansi kabupaten/kota yang berkepentingan
- e. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukum belum memiliki tempat penyimpanan yang layak
- f. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di Kota Batam masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi

2. Isu-isu penting terkait Urusan Kebudayaan

- a. Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Nilai Kebudayaan, Norma, dan Pembangunan Berbasis Gender.
- b. Belum Selarasnya Perencanaan Dan Pengembangan Kebudayaan Antara Kabupaten/Kota Dengan Provinsi.
- c. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.

- d. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

3. Isu-isu penting terkait Urusan Pariwisata

- a. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas.
- b. Ketidakpastian sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau belum optimal.
- c. Tidak Semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata.
- d. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.
- e. Belum Memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di Kota Batam menjadi kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti kebutuhan jaringan air bersih dan listrik.
- f. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam
- g. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik *online offline* kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Kepulauan Riau.
- h. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional.
- i. Belum semua Destinasi Wisata Kota Batam memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.
- j. Kurangnya pemanfaatan media dalam mempromosikan pariwisata di Kota Batam.

- k. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).
- l. kurangnya apresiasi kreativitas local.
- m. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 2) Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2. Program Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya
3. Program Program Pengelolaan Permuseuman
 - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - 2) Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
 - 3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 - 4) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Administrasi Umum
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota

6. Program Pemasaran Pariwisata

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- 1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- 2) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tabel 2.3 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.22.0	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek kebudayaan yang diletakkan	Persentase objek kebudayaan yang diletakkan	20%	20%	3.135.135.646,00	5.742.618.072,00	1.482.364.354,00	
2.22.0	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang diletakkan	Persentase karya budaya yang diletakkan	20%	20%	1.437.164.000,00	1.327.941.552,00	-109.222.448,00	
2.22.0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	1.391.464.000,00	960.643.552,00	-430.820.448,00	
2.22.0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	50 Orang	50 Orang	45.700.000,00	367.298.000,00	321.598.000,00	
2.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	50 Orang	50 Orang	45.700.000,00	367.298.000,00	321.598.000,00	

2.22.0	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	20 %	20 %	1.123.192.000,00	4.039.769.000,00	2.916.577.000,00	
2.22.0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisiora	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisiora	1 Laporan	2 Laporan	1.123.192.000,00	4.039.769.000,00	2.916.577.000,00	
2.22.0	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	20 %	20 %	574.779.646,00	374.907.520,00	-199.872.126,00	
2.22.0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	111 Orang	111 Orang	574.779.646,00	374.907.520,00	-199.872.126,00	
2.22.0	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah	16,66 %	16,66 %	212.279.000,00	161.138.000,00	102.721.000,00	

			total registrasi	ditetapkan terhadap total registrasi						
2.22.0	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang di register	Jumlah cagar budaya yang di register	16,66 %	16,66 %	212.279.000,00	161.138.000,00	-51.141.000,00	
2.22.0	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	4 Objek	212.279.000,00	161.138.000,00	-51.141.000,00	
2.22.0	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	Tingkatan tipe Museum	B Tipe	B Tipe	1.400.004.000,00	3.817.895.000,00	1.027.516.000,00	
2.22.0	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum	Jumlah pengunjung museum	5000 Pengunjung	5000 Pengunjung	1.400.004.000,00	3.817.895.000,00	2.417.891.000,00	
2.22.0	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	800.003.000,00	800.000.000,00	-3.000,00	
2.22.0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	50 Unit	1 Unit	341.841.000,00	2.206.059.000,00	1.864.218.000,00	
2.22.0	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	50 Unit	50 Unit	258.160.000,00	811.836.000,00	553.676.000,00	

2.22.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	14.153,87 5.644,00	13.796,48 2.183,00	2.226.840,804, 00	
2.22.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	1.705.000, 00	0,00	-1.705.000,00	
2.22.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.705.000, 00	0,00	-1.705.000,00	
2.22.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	8.800.000, 000,00	11.090,66 5.136,00	2.290.665.136, 00	
2.22.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	8.800.000, 000,00	11.028,68 5.136,00	2.228.685.136, 00	
2.22.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dokumen	3 Dokumen	0,00	61.980,00 0,00	61.980.000,00	

2.22.0	Administrasi	Administrasi	Presentase	Presentase	100 %	100 %	76.782.00	37.812.00	-38.970.000,00	
1.2.05	Kepegawaian	Kepegawaian	Administrasi	Administrasi			0,00	0,00		
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kepegawaian	Kepegawaian						
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah						
			yang Terpenuhi	yang Terpenuhi						
2.22.0	Pendidikan dan	Pendidikan dan	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	6 Orang	6 Orang	76.782.00	37.812.00	-38.970.000,00	
1.2.05.	Pelatihan Pegawai	Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas	Berdasarkan Tugas			0,00	0,00		
0009	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang	dan Fungsi yang						
			Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
2.22.0	Administrasi	Administrasi Umum	Persentase	Persentase	100 %	100 %	376.245.0	111.251.0	-	
1.2.06	Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	terpenuhinya	terpenuhinya			00,00	00,00	264.994.000,00	
			penunjang urusan pemerintahan	penunjang urusan pemerintahan						
2.22.0	Penyediaan	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket	Jumlah Paket	3 Paket	3 Paket	51.609.00	51.609.00	0,00	
1.2.06.	Peralatan dan	Peralatan dan	Peralatan dan	Peralatan dan			0,00	0,00		
0002	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
2.22.0	Penyediaan	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket	Jumlah Paket	1 Paket	4 Paket	142.831.0	0,00	-	
1.2.06.	Peralatan Rumah	Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			00,00		142.831.000,00	
0003	Tangga									
2.22.0	Penyediaan Bahan	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan	Jumlah Paket Bahan	3 Paket	3 Paket	55.552.00	0,00	-55.552.000,00	
1.2.06.	Logistik Kantor	Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan	Logistik Kantor yang Disediakan			0,00			
0004										
2.22.0	Penyediaan Barang	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Jumlah Paket	9 Paket	9 Paket	51.215.00	36.000.00	-15.215.000,00	

1.2.06.0005	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0,00	0,00		
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3 Laporan	67.838.000,00	16.442.000,00	-51.396.000,00	
2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	634.886.000,00	0,00	-	634.886.000,00
2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	0,00	-	634.886.000,00
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase kebutuhan jasa	Persentase kebutuhan jasa	100 %	100 %	2.533.265.644,00	2.336.458.048,00	-	196.807.596,00

	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi						
2.22.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.563.000.000,00	1.563.000.000,00	0,00	
2.22.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Lapbran	970.265.644,00	773.458.048,00	-196.807.596,00	
2.22.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.730.992.000,00	220.295.999,00	-1.510.696.001,00	
2.22.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.240.000,00	41.239.999,00	-3.000.001,00	
2.22.0	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	3 Unit	3 Unit	117.690.000,00	112.210.000,00	-5.480.000,00	

1.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			00,00	00,00		
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	55 Unit	87.806.000,00	65.046.000,00	-22.760.000,00	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.481.256.000,00	1.800.000,00	-	1.479.456.000,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1.800.000 Kunjungan	1.800.000 Kunjungan	894.133.200,00	1.062.885.000,00	38.366.800,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	20 %	20 %	664.514.000,00	650.035.000,00	-14.479.000,00	
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	9 Lokasi	664.514.000,00	650.035.000,00	-14.479.000,00	
3.26.03.26.0	Penetapan Tanda	Penetapan Tanda	Jumlah Penetapan	Jumlah Penetapan	1 Laporan	1 Laporan	229.619.200,00	412.850.000,00	183.230.800,00	

2.2.04	Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			00,00	00,00		
3.26.0 2.2.04. 0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Menengah Risiko Rendah di kabupaten?kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Menengah Risiko Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	5 Usaha	229.619.200,00	412.850.000,00	183.230.800,00	
3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah produk pariwisata daerah	Jumlah produk pariwisata daerah	3 Objek 5 Media Promos	3 Objek 5 Media Promos	2.083.548.900,00	3.155.257.450,00	433.548.900,00	
3.26.0 3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	Jumlah obyek pariwisata yang telah dipublikasikan	3 objek	3 objek	2.083.548.900,00	3.155.257.450,00	1.071.708.550,00	
3.26.0 3.2.01.	Peningkatan Kerja Sama	Peningkatan Kerja Sama dan Kermitraan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan	1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.800,00	279.043.000,00	79.043.200,00	

0004	Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					
3.26.0 3.2.01. 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	2 Kegiatan	701.421.100,00	517.971.450,00	-183.449.650,00
3.26.0 3.2.01. 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi	1.182.128.000,00	2.358.243.000,00	1.176.115.000,00
3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dibina	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dibina	155 Orang 2 Sub Sektor	155 Orang 2 Sub Sektor	2.440.556.000,00	1.609.939.000,00	-520.556.000,00
3.26.0 5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	20 %	20 %	2.440.556.000,00	1.609.939.000,00	-830.617.000,00

	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							
3.26.0 5.2.01. 0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	711.832.000,00	348.345.000,00	-363.487.000,00
3.26.0 5.2.01. 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang	1.728.724.000,00	1.261.594.000,00	-467.130.000,00
TOTAL							24.319.532.390,00	29.346.214.705,00	-80.441.002.447,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, Antara lain :

1. Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya
 - a. Belum optimalnya perlindungan dan perawatan situs cagar budaya.
 - b. Minimnya program regenerasi pelaku seni budaya (seniman muda, budayawan lokal).
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata
 - a. asyarakat lokal belum sepenuhnya dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan objek wisata.
 - b. Kurangnya promosi event berskala regional atau internasional untuk menarik wisatawan mancanegara.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk

daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD